

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Persoalan integrasi nasional masih menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut sebagai bagian dari fenomena hubungan internasional. ini disebabkan karena integrasi nasional umumnya berkaitan dengan demokrasi, keamanan regional hingga karakteristik kepemimpinan yang otoriter. Salah satu negara yang menghadapi persoalan disintegrasi nasional adalah Sudan, terkait dengan dis-integrasi wilayah Sudan Selatan.

Sudan merupakan salah satu negara yang terletak di wilayah Timur Laut Afrika. Negara ini berpenduduk sekitar 37,28 juta jiwa pada tahun 2013/2014 dan luas wilayahnya sekitar 1.88 juta km. Jika ditinjau dari bidang politik-pemerintahan, Sudan merupakan negara dengan sistem republik presidensial, dimana presiden Hassan Omar al Bashir menjadi figur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Sudan yang dibantu oleh wakil presiden yang dijabat oleh Bakri Hassan Shaleh.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>“Politic of Sudan”, dalam [http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Politics\\_of\\_Sudan.html](http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Politics_of_Sudan.html), diakses pada tanggal 12 April 2015.

Secara geografis Sudan berbatasan dengan Mesir di sebelah Utara, Laut Merah di sebelah Timur, Kongo dan Republik Afrika Tengah di sebelah Barat Daya, serta Libya di sebelah Barat Laut. Secara geografis, Sudan merupakan negara yang terluas di wilayah Afrika dan memiliki berbagai sumber daya pertanian, antara lain gandum, jagung dan beberapa jenis lainnya yang bukannya berguna untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Sudan, namun juga negara-negara Afrik lainnya. Selain itu, Sudan juga memiliki sumber daya alam yang strategis, antara lain emas, granit, biji besi, perak, uranium, hingga gas alam dan minyak bumi.<sup>2</sup>

Kemudian Sudan Selatan merupakan sebuah negara baru yang merdeka dari Sudan pada tanggal 9 Juli 2011. Sudan Selatan beribukota di Juba dan terbagi atas tiga negara bagian, masing-masing yaitu Bahr el-Chazal, Equatoria dan Greater Upper Nile. Sedangkan provinsi di negara ini berjumlah sepuluh yaitu :<sup>3</sup>

- a. Negara bagian Bahr el-Chazal yang terdiri dari wilayah Bahr el-Ghazal wilayah Utara, Bahr el-Ghazal wilayah Barat, Provinsi Lakes dan Warrap.
- b. Negara bagian Equatoria yang terdiri dari wilayah Equatoria Barat, Equatoria Tengah dan Equatoria Timur.
- c. Negara bagian Upper Nile yang terdiri dari wilayah Jongley, Upper dan Nile.

---

<sup>2</sup>“Sudan : Country Profile”, dalam <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14094995>, diakses pada tanggal 14 April 2015.

<sup>3</sup> “South Sudan Profile”, dalam <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14069082>, diakses pada tanggal 26 April 2015.

Sebagian wilayah Sudan Selatan ternyata banyak memiliki perbedaan dengan wilayah Sudan Utara (Sudan) karena sebagian besar merupakan hutan tropis, sedangkan Sudan Utara di dominasi oleh gurun pasir dan pesisir. Sudan Selatan memiliki sumber daya alam yang belum diolah secara maksimal, baik hasil pertanian, kehutanan ataupun pertambangan. Wilayah geografis Sudan dan Sudan Selatan lihat pada peta 1.1. sebagai berikut :

**Peta 1.1.**

**Wilayah Geografis Sudan dan Sudan Selatan**



Sumber : “Maps of Sudan and South Sudan”, dalam <http://bodysmartinc.com/photoid/map-of-south-sudan-and-ethiopia>, diakses pada tanggal 29 Januari 2014.

Sudan Selatan, secara resmi Republik Sudan Selatan, adalah negara terkurung daratan di Afrika timur. Juba adalah ibu kotanya. Batas sebelah timurnya adalah Ethiopia, batas sebelah selatan Kenya, Uganda, dan Republik Demokratik Kongo, dan batas sebelah baratnya adalah Republik Afrika Tengah dan disebelah utara adalah Republik Sudan. Di sebelah utara terletak wilayah Sudan Utara yang didominasi oleh etnis Arab dan mayoritas penduduknya adalah Muslim, tempat kedudukan pemerintahan pusat Sudan, dengan ibu kota Khartoum. Sudan Selatan didominasi oleh etnis-etnis Afrika dan mayoritas penduduknya adalah Kristen. Sudan Selatan yang beriklim tropis juga berbeda dengan iklim Sudan Utara yang berada di wilayah Sub-Sahara. Pada tanggal 9 sampai pada tanggal 15 Januari 2011, Sudan Selatan menyelenggarakan referendum untuk menentukan masa depan mereka, apakah akan terus bersatu dengan wilayah utara atau akan memisahkan diri menjadi negara merdeka. Per 9 Juli 2011, mereka menjadi negara merdeka bernama resmi Republik Sudan Selatan.<sup>4</sup>

Sebelum terlepas dari wilayah Sudan Utara, Sudan Selatan merupakan wilayah yang mengalami tingkat pembangunan yang rendah, baik pada bidang politik, ekonomi ataupun sosial. Pada bidang politik, Sudan Selatan hanya memiliki

---

<sup>4</sup> “Government of Republic of South Sudan”, dalam <http://www.goss.org/>, diakses pada tanggal 16 April 2015.

tiga wilayah perwakilan, masing-masing Bar el-Ghazal, Equatoria dan Greater Up Nile. Ini tentunya berbeda dengan wilayah Sudan Utara yang memiliki perwakilan di parlemen sebanyak delapan belas perwakilan. Kondisi ini tentunya akan menyebabkan kesenjangan dalam pembuatan kebijakan di negara ini.<sup>5</sup>

Kemudian pada bidang sosial, perkembangan masyarakat antara wilayah Sudan Utara dan Sudan Selatan memang memiliki banyak perbedaan. Di satu sisi masyarakat Sudan Utara sebagian besar memiliki mata pencaharian yang beragam, dimana terdapat kelompok nelayan, pedagang, pemilik usaha dan jasa hingga para profesional, namun kelompok masyarakat Sudan Selatan mata pencaharian wilayah ini cenderung homogen yaitu mayoritas sebagai petani dan penggembala. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan keterbelakangan dan kemiskinan yang berpengaruh disintegrasi antara Sudan Selatan.

Pada bidang sosial dan kepercayaan antara wilayah Sudan Utara dan Sudan Selatan memang berbeda. Wilayah Sudan Utara mayoritas merupakan keturunan Arab yang beragama Islam, sedangkan Sudan Selatan mayoritas merupakan keturunan Afrika yang beragama Nasrani. Kondisi inilah yang memperperah kedua belah wilayah yang kemudian menyebabkan potensi dis-integrasi antara wilayah Sudan dan Sudan Selatan. Hal ini juga di dukung oleh pernyataan James Wani Iga

---

<sup>5</sup> Aveliono Androga, *A Concise History of South Sudan*, Carlos Gdames Fuentes Publishing, Kampala dan London, 2013, hal.23-24.

yang di tahun 2011 berhasil menjabat sebagai wakil presiden Sudan Selatan yang menyatakan bahwa :

*“...Persoalan tentang Sudan Selatan dan pusat (Sudan Utara) memang menjadi persoalan yang semakin sulit untuk terselesaikan. Lebih ideal jika masyarakat internasional dapat mengakomodasi kemerdekaan Sudan Selatan. Selain itu, pemerintahan Sudan di bawah kepemimpinan Hassan Omar al-Bashir yang cenderung menyudutkan dan menjalankan kebijakan-kebijakana diskriminatif membuat kami lebih terdorong untuk memperjuangkan kemerdekaan dari pusat.”*

Persoalan sosial, ekonomi dan politik yang mengalami ketimpangan menjadi gambaran antara Sudan dan Sudan Selatan jauh sebelum disintegrasi kedua wilayah terjadi. Kemudian perbedaan karakteristik etnis dan masyarakat juga ikut berkontribusi dalam mendukung sulitnya integrasi dan asimilasi diantara masyarakat dan elit politik Sudan dan Sudan Selatan.

Pasca kemerdekaannya pada tahun 2011, kemudian Sudan Selatan menjadi negara yang independen. Negara ini telah memiliki perimbangan kekuasaan, yang terbagi atas legislatif (parlemen) eksekutif (pemerintah) dan yudikatif (lembaga peradilan). Untuk mendukung kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden

Salva Kir Mayardit maka dibentuklah beberapa departemen/kementerian diantaranya kementerian urusan pertahanan dan veteran, kementerian kesehatan, kementerian pertanian dan kehutanan, kementerian gensem anak-anak dan kesejahteraan sosial, serta kementerian-kementerian lainnya.<sup>6</sup>

Proses disintegrasi Sudan Selatan secara *de-facto* dan *de-jure* memiliki status yang jelas karena tidak hanya diakui oleh PBB, namun juga negara-negara dunia. Masing-masing yaitu :<sup>7</sup>

- a. Negara-negara wilayah Afrika, yaitu Burkina Faso, Angola, Somalia, Libya, Ethiopia, Afrika Selatan dan Kenya.
- b. Negara-negara wilayah Eropa (Uni Eropa), yaitu Jerman, Inggris, Italia, Republik Irlandia, Perancis, Belanda, Polandia, Rumania, Spanyol, Austria, Swiss, Belgia, Estonia, Yunani, Luxemburg dan Portugal.
- c. Negara-negara di wilayah Amerika, yaitu Amerika Serikat, Brazilia, Chile dan Kanada.
- d. Negara-negara di wilayah Asia-Oceania, yaitu Indonesia, Korea Selatan, India, Cina, Australia, Turki, Jepang, Yordania, Qatar, Maladewa, Bahrain dan Kuwait.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> “Chronology of Relating of South Sudan”, dalam <http://www.securitycouncilreport.org/chronology/sudansouth-sudan.php>, diakses pada tanggal 19 April 2015.

Disintegrasi Sudan Selatan ternyata tidak terjadi dalam kurun waktu yang singkat (reaksioner), namun melalui berbagai tahapan yang panjang. Hal ini dimulai dari berakhirnya penyatuan Anglo Sudan bersama dengan Mesir yang disatukan di bawah otoritas Kolonial Inggris pada 31 Desember 1955. Kemudian pada tanggal 6 Januari 2005 dibicarakan konsep perjanjian damai antara Sudan dan Sudan Selatan yang dilanjutkan dengan peneran otonomi khusus di wilayah Sudan Selatan pada 9 Juli 2005 yang kemudian berakhir dengan kemerdekaan Sudan Selatan pada 9 Juli 2011.<sup>8</sup>

Kondisi diskriminasi dan perbedaan perkembangan sosial-ekonomi antara Sudan Utara dan Sudan Selatan kemudian menyebabkan munculnya gerakan-gerakan sosial secara sporadis. Sebagai contoh penyerangan di wilayah Sennar pada tahun 1966 yang menyebabkan enam orang tewas ataupun Babanusa yang merupakan wilayah perbatasan antara Sudan Utara dan Selatan pada tahun 1967.<sup>9</sup>

Asporasi dan respon pemerintah Sudan Utara yang tidak kunjung menghargai keberadaan masyarakat Sudan Selatan kemudian menyebabkan konflik yang lebih besar yang memicu terjadinya perang saudara I antara Sudan Selatan dan Utara pada tahun 1972. Kemudian perang saudara antara Sudan Selatan dan Utara juga terjadi pada tahun 1983. Kasus ini merupakan tahapan separatisme antara Sudan Selatan dan Utara secara sistematis tidak lagi menjadi gerakan yang tercerai berai.

---

<sup>8</sup> "Sudan and South Sudan : Conflict Profile", dalam <http://www.insightonconflict.org/conflicts/sudan/conflict-profile/>, diakses pada tanggal 19 April 2015.

<sup>9</sup> *Ibid.*



Rekonsiliasi konflik yang tidak kunjung menemui titik temu akhirnya mendorong intervensi pihak-pihak internasional untuk ikut mendukung penyelesaian masalah ini. di tahun 2005 Amerika Serikat bersama-sama dengan Dewan Keamanan PBB berinisiatif untuk menjadikan Darfur Selatan sebagai wilayah yang memiliki otonomi khusus. Pada kenyataannya penerapan otonomi khusus ternyata tidak sepenuhnya berhasil dan kemudian ini berujung pada kemerdekaan Sudan Selatan pada tahun 2011.

Dis-integrasi antara Sudan Utara dan Selatan tahun 2011 menunjukkan bahwa adanya persoalan yang mendasar (*elementary of problem malignancy*) baik dalam bidang politik ataupun sosial-ekonomi, sehingga antara dua wilayah ini gagal dalam mencapai kesepakatan permanen dan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak (*win-win solution*). Integrasi yang dicapai Sudan Utara dan Selatan sebelum tahun 2011 menjadikan negara ini sebagai negara yang terbesar secara geografis dan ternyata tidak mudah dalam menjaga keutuhan wilayah seiring dengan berkembangnya konstelasi politik regional Afrika.<sup>10</sup>

Besarnya cakupan pengaruh secara geografis dan politis kemudian menimbulkan problematika yang semakin tidak terkontrol. Di satu sisi wilayah Sudan Utara berkembang sebagai kekuatan baru di wilayah Afrika/Timur-tengah dengan kapasitas minyak dan pertambangan lainnya, sedangkan wilayah Sudan Selatan

---

<sup>10</sup> Abdullah A. Gallab, *Their Second Republic : Islamims in Sudan From Dis-Integration To Oblivion*, Ashgate Publishing Company, Dorchester, 2014, hal.37-28.

menjadi area yang kurang populer baik di Sudan dan wilayah Timur-tengah pada umumnya. Seiring dengan berkembangnya waktu, persoalan ini kemudian semakin mengerucut dan pada akhirnya berujung pada dis-integrasi antara Sudan Utara dan Selatan. Kasus ini tentunya tidak sekedar euforia semata, namun diakibatkan oleh berbagai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh para pembuat kebijakan di negara ini.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan dalam suatu pertanyaan sebagai berikut :

*”Faktor apa saja yang menyebabkan di-sintegrasi antara wilayah Sudan dan Sudan Selatan pada tahun 2011 ?”*

## **C. Kerangka Teori**

Untuk menjelaskan untuk menjawab pokok permasalahan dan menarik hipotesa maka penulis menggunakan kerangka teori, yaitu teori integrasi nasional. pendekatan ini dipandang relevan dengan kasus yang sedang dibahas karena mampu

menjabarkan secara terperinci tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disintegrasi antara wilayah Sudan dan Sudan Selatan pada tahun 2011.

Istilah integrasi nasional berasal dari dua kata yaitu integrasi dan nasional. Istilah integrasi mempunyai arti pembauran/penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh / bulat. Istilah nasional mempunyai pengertian kebangsaan, bersifat bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa seperti cita-cita nasional, ideologi nasional, kepentingan nasional hingga perusahaan nasional. Istilah integrasi nasional merujuk kepada seluruh unsur dalam rangka melaksanakan kehidupan bangsa, meliputi sosial, budaya ekonomi, maka pada intinya integrasi nasional lebih menekankan persatuan persepsi dan perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian Integrasi nasional dapat diartikan penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa.<sup>11</sup>

Integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar, yakni integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari kata Latin yakni *integrate* yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata Nasional berasal dari kata *nation* berasal dari Bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dalam Kamus Besar

---

<sup>11</sup>Anthony H. Birch and Paul Nchoji, *Nationalism and National Integration*, African Book Collective Publishing, Toronto, 2002, hal.19.

Bahasa Indonesia, Integrasi nasional mempunyai arti sebagai berikut. Integrasi nasional berkaitan dengan dua hal penting, yaitu :<sup>12</sup>

1. Secara politis, integrasi berarti proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional.

Jika dikaitkan dengan proses dis-integrasi antara wilayah Sudan Utara dan Sudan Selatan maka perbedaan yang dominan antara entitas-entitas sosial-politik akan menyebabkan kesenjangan dan mengarah ke perpecahan atau *commulatives cleavages*. Pada prinsipnya masalah pluralisme yang menyangkut perbedaan agama, kultur etnis dan lain-lainnya dapat diselesaikan dengan mengakomodasi aspirasi dan kepentingan atau setidaknya dengan menerapkan demokrasi konsosiasional. Pada kasus di Sudan hal ini tidak diterapkan yang pada akhirnya berkembang menjadi disintegrasi di kedua wilayah.

---

<sup>12</sup>Howard Wrigins and Joseph Gotlieb, *Development, Environment and Global Dysfunction Roward Sustainable Recovery*, St Lucie Press, Florida, 1996, hal.21

2. Secara antropologis, integrasi berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat.

Jika dikaitkan dengan proses disintegrasi antara Sudan Selatan dan Sudan Utara maka penyesuaian antar unsur-unsur budaya dapat terjadi jika masyarakat dapat menerima masyarakat lain sebagai bagian dari identitas nasional Sudan. Dengan kata lain secara antropologis masyarakat atau elit antara suatu wilayah di Sudan akan merasa memiliki perbedaan yang mendasar yang pada akhirnya akan berkembang ke renah sosial yang lebih luas, diantaranya budaya, ekonomi-politik hingga agama.

Menurut CR Mitchell dan William Hokins integrasi nasional suatu negara akan terhambat jika sebuah rezim tidak dapat mencapai keenam unsur yang akan dijelaskan dibawah ini . Hal ini sesuai dengan pernyataannya CR Mitchell yang menyatakan bahwa :

*“...bahasa, agama, kebudayaan dan suku bangsa menjadi persoalan penting yang dapat menghambat integrasi nasional. Kemudian pengarusutamaan gagasan ideologi dan kebudayaan dan ikatan-ikatan sosial*

*menjadi faktor sekunder yang dapat menghambat integrasi nasional. ini khususnya akan mudah terjadi pada kelompok negara-negara dunia ketiga.”<sup>13</sup>*

Pada dasarnya menurut CR Mitchell dan William Hokins terdapat enam unsur penting dalam identitas nasional pendukung integrasi nasional, masing-masing adalah:<sup>14</sup>

1. Suku bangsa, yaitu golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Jika dikaitkan dengan kasus dis-integrasi antara Sudan Utara dan Sudan Selatan maka hal ini berkaitan dengan perbedaan suku bangsa, dimana Sudan Utara di dominasi oleh keturunan Arab, sedangkan Sudan Selatan merupakan keturunan Afrika.
2. Agama, yaitu terkait dengan posisi agama memiliki peranan penting untuk menjembatani kehidupan spiritual antara manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan manusia. Jika dikaitkan dengan kasus dis-integrasi antara Sudan Utara dan Sudan Selatan maka terdapat perbedaan bahwa mayoritas

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal.38.

<sup>14</sup>CR Mitchell and William Hopkins, *The National Identity : From Conventional to Contemporary Approach*, John Hopkins University Press and Publishing, Baltimore, 2008, hal.31-32.

penduduk Sudan Utara merupakan pemeluk Islam yang dipengaruhi oleh kultur negara-negara Timur-tengah, khususnya Semenanjung Arab, sedangkan Sudan Selatan mayoritas merupakan pemeluk Nasrani akibat dipengaruhi oleh kolonisasi bangsa Eropa.

3. Kebudayaan, yaitu pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Jika dikaitkan dengan kasus dis-integrasi antara Sudan Utara dan Sudan Selatan maka terdapat perbedaan yang menonjol bahwa sebagian besar masyarakat Sudan Utara merupakan kelompok pedagang/peniagaan yang maju, sedangkan masyarakat Sudan selatan merupakan kelompok petani dan penggembala, serta profesi-profesi lainnya yang memiliki ketergantungan dengan alam.
4. Bahasa, yaitu unsur pendukung Identitas Nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbitrer dibentuk atas unsure-unsur ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar

manusia. Jika dikaitkan dengan kasus dis-integrasi antara Sudan Utara dan Sudan Selatan maka seperti halnya etnis dan kultur, maka bahasa secara otomatis juga akan berbeda. Kondisi ini kemudian akan menyulitkan asimilasi dan pembauran antara masyarakat Sudan Utara dan Sudan Selatan.

5. Pengarusutamaan gagasan ideologi dan kebudayaan, yaitu bagaimana entitas-entitas sosial-politik dapat bertahan dari pengaruh luar sehingga dapat dengan konsisten menjaga kelangsungannya. Jika dikaitkan dengan kasus dis-integrasi antara Sudan Utara dan Sudan Selatan maka kebudayaan yang berbeda antara dua wilayah kemudian menyebabkan ideologi diantara keduanya secara *de-facto* menjadi berbeda.
6. Ikatan-ikatan sosial dan ekonomi-politik formal, yaitu keberadaan entitas-entitas kelompok untuk membangun kepentingan-kepentingannya secara eksklusif dan inklusif dengan masyarakat lainnya ataupun untuk memperjuangkan kepentingannya dalam konteks formal (politik kenegaraan). Jika dikaitkan dengan kasus dis-integrasi antara Sudan Utara dan Sudan Selatan maka antar masyarakat dua wilayah tersebut gagal dalam membangun ikatan-ikatan inklusif yang berakibat semakin terkotak-kotaknya sistem sosial-ekonomi antara Sudan Utara dan Sudan Selatan.



Kemudian pendekatan selanjutnya adalah konsep intervensi. Pada dasarnya intervensi yang dilakukan oleh negara asing (khususnya negara besar) biasanya merupakan tindakan yang sangat dramatik, karena diorganisasikan dengan amat baik. Intervensi merupakan semua tindakan yang mempunyai dampak tertentu secara langsung atau lambat laun pada politik dalam negeri suatu negara lain, termasuk di dalamnya semua bentuk bujukan dan program diplomatik, ekonomi serta militer.

James Rosenau mengemukakan definisi dari intervensi yaitu bahwa intervensi dapat dibedakan dari bentuk-bentuk lain tindakan negara karena intervensi (1) merupakan pemutusan tajam dari bentuk-bentuk intervensi konvensional dalam hubungan suatu negara, (2) dengan sadar diarahkan untuk mengubah atau mempertahankan struktur penguasa politik di negara sasaran. Dengan demikian program-program bantuan asing walaupun mungkin mempunyai konsekuensi-konsekuensi langsung atas penguasa politik dalam suatu masyarakat, tidak akan dianggap sebagai intervensi, karena tidak merupakan suatu pemutusan radikal dari suatu hubungan konvensional.<sup>15</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa intervensi adalah bagian dari politik luar negeri suatu negara terhadap negara lain dengan cara melakukan campur tangan terhadap masalah dalam negeri negara lain sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau meningkatkan nilai sosial di luar negeri melalui berbagai kegiatan di bidang politik, ekonomi, maupun militer.

---

<sup>15</sup> Patrick M Regan, *Civil War and Foreign Power*, University of Michigan, Michigan, 2002, hal.29.

Intervensi merupakan suatu akibat dari kemelut, kemudian pengiriman pasukan dengan cepat, sering juga dengan menangkap pemimpin rezim sasaran.<sup>16</sup>

Persoalan tentang integrasi nasional memang telah menjadi persoalan klasik yang terus bertransformasi hingga era globalisasi. Umumnya persoalan tentang disintegrasi terjadi pada kelompok negara dunia ketiga. Hal ini disebabkan karena negara maju telah memiliki struktur sosial-politik pemerintahan yang lebih terbentuk secara mapan dan kondusif, serta kebijakan-kebijakan yang akuntabel dan transparan yang harus memenuhi perimbangan kekuasaan, baik legislatif, eksekutif ataupun yudikatif.

Jika dikaitkan dengan dinamika sosial-politik negara-negara Afrika ataupun Timur-tengah, termasuk Sudan dan Sudan Selatan maka dapat difahami bahwa hampir semua negara yang terletak di wilayah ini merupakan kelompok negara dunia ketiga (negara berkembang) yang pernah menjadi obyek jajahan kelompok negara-negara kolonialis Eropa, baik Inggris, Perancis ataupun Belgia. Kondisi ini kemudian menyebabkan keteringgalan pembangunan dan pencarian identitas nasional negara-negara Afrika dan Timur-tengah, jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa ataupun Amerika Latin.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> K.J.Holsti, *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis Jilid 1 dan 2*, Erlangga, Jakarta 1988, hal 9

<sup>17</sup> WW. Carroll and Billy Wright, *The Middle East : From Conflict to National Identity Building*, Palgarff Publishing, London and New York, 2010, hal.9.

Keberhasilan Sudan Selatan dalam memerdekakan diri dan Sudan merupakan bentuk separatisme yaitu suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain). Istilah ini biasanya tidak diterima para kelompok separatis sendiri karena mereka menganggapnya kasar, dan memilih istilah yang lebih netral seperti determinasi diri. Gerakan separatis sering merupakan gerakan yang politis dan damai.

Melalui uraian pendekatan di atas maka dapat difahami bahwa persoalan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disintegrasi antara wilayah Sudan dan Sudan Selatan pada tahun 2011 ternyata tidak lepas dari dinamika politik-pemerintahan Sudan yang dijalankan secara otoriter. Kepemimpinan Hassan al-Bashir cenderung membedakan antara wilayah Sudan dengan Sudan dan kemudian hal ini diperparah dengan faktor agama, kebudayaan dan ikatan-ikatan sosial dimana karakteristik kedua pihak memang berbeda sehingga menimbulkan disintegrasi bangsa.

Kemudian persoalan disintegrasi antara wilayah Sudan dan Sudan Selatan pada tahun 2011 juga dipengaruhi oleh intervensi Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Sudan Selatan merupakan salah satu wilayah kaya minyak dan jumlah penduduknya yang relatif besar kemudian menjadi hal yang sangat potensial bagi pemasaran produk-produk Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Selama masih tergabung dengan Sudan di bawah kepemimpinan Hassan al-Bashir, upaya-

upaya-upaya dan kepentingan negara-negara Barat akan sulit tercapai karena Hassan al-Bashir merupakan figur pemimpin yang anti Barat.

Antara Sudan dan Sudan Selatan merupakan dua wilayah yang memiliki perbedaan, baik dalam bidang politik, ekonomi ataupun sosial, dimana Sudan Selatan dianggap lebih terbelakang dibandingkan Sudan Selatan, meskipun pada faktanya Sudan Selatan memiliki berbagai sumber daya alam dan manusia yang relatif potensial. Inilah yang kemudian menjadi bagian dari kepentingan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya untuk mengembangkan pengaruh dan hegemoninya di wilayah Sudan Selatan, sehingga pasca kemerdekaannya di tahun 2011 hubungan antara Sudan Selatan dengan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya akan dapat berjalan dengan efektif.

#### **D. Hipotesa**

Dengan merunut permasalahan yang telah dikemukakan serta berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang dipakai, maka dapat ditarik hipotesa sebagai berikut bahwa faktor-faktor yang menyebabkan disintegrasi antara wilayah Sudan dan Sudan Selatan pada tahun 2011 dipengaruhi oleh faktor agama, kebudayaan dan ikatan-ikatan sosial, ekonomi-politik formal, serta adanya intervensi dari Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada analisa data-data yang sifatnya non-angka dan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik sebagai pendekatannya. Sedangkan analisis data penulis menggunakan deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk menggambarkan situasi yang dipandang relevan secara obyektif dan jelas atas dasar fakta-fakta yang terjadi untuk kemudian diambil kesimpulan.

Fakta atau informasi yang memanfaatkan data sekunder yang digunakan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam karya skripsi ini. Proses analisa dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dimana data yang telah dikumpulkan dan kemudian disusun dan dipaparkan sehingga ditemukan gambaran yang sistematis dari permasalahan penelitian.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui penelitian perpustakaan (*library research*). Data diperoleh dan kemudian disortir sesuai dengan tema yang diambil melalui sumber-sumber yang berasal dari buku-buku, jurnal, surat kabar dan internet.

## **G. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjawab perumusan masalah dan membuktikan hipotesa tentang berbagai faktor dalam proses disintegrasi antara wilayah Sudan dan Sudan Selatan pada tahun 2011.
2. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis serta pihak-pihak yang membutuhkan tentang berbagai dinamika politik-pemerintahan negara-negara Afrika, khususnya Sudan.
3. Melalui penelitian skripsi ini nantinya dapat menambah daya kritis dan pengetahuan tentang beberapa mata kuliah yang telah penulis dapat tentang politik-pemerintahan Timur-tengah, peradaban negara-negara Islam, serta diplomasi dan rekonsiliasi konflik.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Dalam rangka mempermudah penulisan karya skripsi ini penulis memberikan batasan penelitian pada tahun 2005-2011. Dipilih tahun 2005 karena pada tahun ini diselenggarakan perjanjian damai dan pemberian hak otonomi, sedangkan tahun 2011 merupakan periode yang menunjukkan kemerdekaan Sudan Selatan dan Sudan. Jangkauan di luar tahun tersebut sedikit disinggung selama masih ada keterkaitan dan kerelevansian dengan tema yang sedang dibahas.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan bab-bab selanjutnya, penulis akan membagi pembahasan ke dalam lima bab, dengan perincian masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesis, metode penelitian, teknik pengumpulan data jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang membahas profil Sudan dan Sudan Selatan. Pembahasan meliputi bidang politik dan pemerintahan, sosial, ekonomi dan keamanan.

BAB III merupakan bab yang membahas tentang dinamika disintegrasi antara Sudan dan Sudan Selatan tahun 2005-2011 dari peristiwa perjanjian damai, penerapan otonomi khusus hingga kemerdekaan Sudan Selatan dari otoritas kedaulatan Sudan di bawah kepemimpinan Hassan al-Bashir.

BAB IV membahas tentang pembuktian hipotesa yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan disintegrasi antara wilayah Sudan dan Sudan Selatan pada tahun 2011 yang dipengaruhi oleh faktor agama, kebudayaan dan ikatan-ikatan sosial, ekonomi-politik formal, serta adanya intervensi dari Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya.

BAB V merupakan bab berisi kesimpulan dari uraian pembahasan bab-bab sebelumnya